

ABSTRAK

ANALISIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PRA DAN PASCA PENERAPAN UU NO. 7 TAHUN 2021 DALAM EKUALISASI SPT MASA PPN DENGAN LAPORAN KEUANGAN PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 7 MADIUN

Kharisma Shindi
NIM 203209026

Adanya kebijakan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan pengaruh terhadap perubahan peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku, terkait perubahan tersebut akan memberikan dampak terhadap penerima kewajiban PPN. Oleh karenanya dibutuhkan adanya sinergitas melalui dua cara diantaranya komunikasi dan koordinasi yang baik terkait kebijakan tersebut untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan penerima kewajiban PPN. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta membandingkan hasil perhitungan PPN sebelum dan sesudah diterapkannya UU No. 7 Tahun 2021 dalam ekualisasinya dengan laporan keuangan. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara wawancara, mengumpulkan data, menganalisis penerapannya, mendeskripsikan hasil analisis, hingga menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan UU No. 7 Tahun 2021 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 7 Madiun masih ada miskomunikasi antara perusahaan dengan vendor. SPT Masa PPN telah dilaporkan setiap bulannya dan hasil dari ekualisasi sering terjadi lebih bayar.

Kata kunci: *Undang-undang No. 7 Tahun 2021, SPT Masa PPN, Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai.*

ABSTRACT

ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX PRE AND POST APPLICATION OF LAW NO. 7 OF 2021 IN THE EQUALIZATION OF VAT PERIOD TAX RETURNS WITH FINANCIAL STATEMENTS AT PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 7 MADIUN

Kharisma Shindi
NIM 203209026

There is a policy of Law no. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) has an impact on changes to the applicable Value Added Tax (VAT) regulations, regarding these changes will have an impact on recipients of VAT obligations. Therefore, there is a need for synergy in two ways, including good communication and coordination regarding this policy to equalize perceptions between the government and recipients of VAT obligations. The purpose of this study is to find out and compare the results of VAT calculations before and after the implementation of Law no. 7 of 2021 in its equalization with financial reports. The types of data used are primary data and secondary data with data collection techniques in the form of interviews and documentation, which are then analyzed using qualitative analysis techniques, namely by interviewing, collecting data, analyzing its application, describing the results of the analysis, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the application of Law no. 7 of 2021 at PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 7 Madiun there is still miscommunication between the company and the vendor. VAT Periodic SPT has been reported every month and the results of equalization often occur overpayment.

Keywords: Law No. 7 of 2021, VAT Period Tax Return, Law on Harmonization of Tax Regulations, Value Added Tax.